

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

R.Yudi Sidharta¹, Nurdina²

Email: ryudisidharta@stiesia.ac.id¹; nurdina@unipasby.ac.id²

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)¹

Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari tingginya risiko praktik pelaporan oportunistik di sektor pertambangan yang dipengaruhi oleh kompleksitas biaya, volatilitas harga komoditas, serta kelemahan pengawasan tata kelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi perusahaan pertambangan periode 2020–2022. Sampel dipilih melalui purposive sampling dan diperoleh 17 perusahaan dengan total 51 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dalam menekan praktik manajemen laba, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan perpajakan dan penguatan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif mampu memperkecil peluang perilaku manajerial opportunistic dalam pelaporan keuangan.

Kata kunci: perencanaan pajak, corporate governance, manajemen laba, komisaris independen, kepemilikan institusional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax planning and corporate governance mechanisms on earnings management in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The background of the research stems from the high risk of opportunistic reporting practices in the mining sector, which is affected by cost complexity, commodity price volatility, and weaknesses in governance oversight. The study employs a quantitative approach with a population of mining companies for the 2020–2022 period. The sample was selected using purposive sampling and consists of 17 companies with a total of 51 observations. The analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that tax planning, independent commissioners, and institutional ownership have a significant effect in mitigating earnings management practices, whereas the audit committee has no significant effect. These findings underscore the importance of integrating tax policies and strengthening governance to improve the quality of financial reporting. The study concludes that effective monitoring mechanisms can reduce the likelihood of opportunistic managerial behavior in financial reporting.

Keywords: tax planning, corporate governance, earnings management, independent commissioners, institutional ownership.

Pendahuluan

Ketidakpastian kondisi ekonomi dan volatilitas pasar global meningkatkan tekanan eksternal bagi perusahaan, terutama pada sektor yang sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas seperti pertambangan. Tekanan tersebut mendorong manajemen untuk menempuh strategi pelaporan yang dapat meredam gejolak kinerja, termasuk melalui praktik manajemen laba dan perencanaan pajak. Studi Syahputra dan Nurfadila (2023) menunjukkan bahwa meskipun menjadi penyumbang pajak terbesar, sektor pertambangan juga merupakan salah satu sektor dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Temuan Anggraini dan Putra (2022) lebih lanjut mengindikasikan bahwa tekanan biaya dan volatilitas komoditas memperkuat insentif perusahaan pertambangan untuk melakukan penghindaran pajak.

Sejalan dengan fenomena tersebut, analisis yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (2024) dan diperkuat oleh penelitian Lubis dan Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa lemahnya transparansi serta mekanisme tata kelola, khususnya dalam aspek pelaporan anti-korupsi, penanganan konflik kepentingan, dan pengungkapan *beneficial ownership* secara signifikan meningkatkan risiko kecurangan pelaporan (*fraud*), termasuk manipulasi laba. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh volatilitas harga global. Sebagaimana dicatat dalam penelitian empiris oleh Hidayat dan Sari (2021), sektor pertambangan memperlihatkan fluktuasi laba dan profitabilitas yang tajam, yang memicu manajer untuk melakukan income smoothing melalui pemilihan akrual secara oportunistik. Penelitian Wicaksono dan Lestari (2020) juga menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan cenderung mengelola laba lebih agresif selama periode ketidakpastian ekonomi untuk menjaga stabilitas kinerja di mata investor dan kreditur.

Keterkaitan antara tekanan eksternal dan perilaku pelaporan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik sektor pertambangan itu sendiri. Sektor pertambangan

merupakan salah satu pilar strategis perekonomian Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, devisa, serta menopang rantai pasok energi dan industri. Di sisi lain, sektor ini ditandai oleh karakteristik akuntansi dan perpajakan yang kompleks akibat fluktuasi harga komoditas, tingginya biaya eksplorasi, serta intensitas penggunaan aset tetap yang tinggi. Kompleksitas tersebut menciptakan ruang lebih luas bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk praktik manajemen laba. Secara teoritis, manajemen laba dipandang sebagai intervensi manajer terhadap proses pelaporan keuangan (Healy & Wahlen, 1999; Dechow, Ge, & Schrand, 2010), dan temuan Owner (2021) menegaskan bahwa sektor berbasis komoditas memiliki sensitivitas tinggi terhadap manipulasi laporan keuangan ketika volatilitas harga meningkat.

Berangkat dari kompleksitas pelaporan tersebut, konteks perpajakan menjadi salah satu area strategis yang sering dimanfaatkan perusahaan. Perencanaan pajak dipahami sebagai upaya sistematis untuk meminimalkan beban pajak melalui kebijakan akuntansi, penataan transaksi, dan pemanfaatan celah regulasi. Namun temuan empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Rahmawati dan Sugiarto (2022) serta Putri et al. (2021) menemukan bahwa perencanaan pajak dapat meningkatkan peluang manajemen laba, sedangkan Ardiansyah dan Mulyani (2023) menunjukkan bahwa pengawasan fiskal yang ketat dapat menekan manipulasi akrual. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan struktur pengawasan.

Pada saat yang sama, mekanisme *corporate governance* seharusnya berfungsi sebagai pengendali perilaku oportunistik manajemen. Mekanisme seperti komisar independen, komite audit, dan kepemilikan institusional dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan memastikan akuntabilitas. Penelitian Lestari dan Widodo (2021) membuktikan bahwa penguatan mekanisme pengawasan internal mampu

menurunkan praktik manajemen laba. Namun, Sondakh dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme ini tidak selalu merata, terutama pada industri dengan struktur biaya yang kompleks seperti pertambangan.

Temuan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan karakteristik perusahaan pertambangan di Indonesia. Struktur biaya eksplorasi dan depresiasi yang besar, dinamika kebijakan royalti, dan insentif fiskal membuka peluang bagi manajer untuk memodifikasi angka laba. Siregar dan Lestari (2022) menemukan adanya kecenderungan *smoothing* laba ketika harga komoditas berfluktuasi, sementara Yusuf, Hadi, dan Kurniawan (2021) serta Rakhmawati dan Sudirman (2023) menegaskan bahwa kompleksitas biaya dan perubahan regulasi fiskal meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan. Namun, penelitian yang menguji pengaruh perencanaan pajak dan mekanisme *corporate governance* secara simultan pada sektor pertambangan masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait ketidakkonsistenan hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba, efektivitas mekanisme *corporate governance* pada industri ekstraktif, serta keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model empiris. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan terbaru belum banyak dievaluasi dampaknya terhadap perilaku pelaporan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak, komisar independen, dan kepemilikan institusional mampu menekan praktik manajemen laba, sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan fiskal dan tata kelola perusahaan yang efektif merupakan elemen

penting dalam meningkatkan integritas dan kualitas pelaporan keuangan pada sektor pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan literatur mengenai pelaporan keuangan pada sektor ekstraktif, sekaligus kontribusi praktis bagi regulator, investor, auditor, dan perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang memiliki perbedaan kepentingan dan tingkat informasi yang tidak seimbang. Informasi yang tidak simetris (*information asymmetry*) membuka ruang bagi manajer untuk bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi, salah satunya melalui praktik manajemen laba (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian Healy dan Wahlen (1999) menegaskan bahwa manajemen laba sering muncul ketika manajer menghadapi tekanan untuk memenuhi target kinerja, mempertahankan citra stabilitas perusahaan, atau menyelaraskan kepentingan kontraktual tertentu.

Dalam konteks perpajakan, perencanaan pajak dapat dimanfaatkan manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi dan pengaturan transaksi. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Rakhmawati dan Sugiarto (2022), strategi pajak sering kali berjalan beriringan dengan tindakan oportunistik lainnya, termasuk manipulasi akrual untuk menampilkan beban pajak atau laba tertentu. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang lemah memperbesar peluang manajer bertindak oportunistik karena lemahnya mekanisme pengawasan (Lestari & Widodo, 2021).

Dengan demikian, dalam perspektif keagenan, perencanaan pajak dan mekanisme *corporate governance* berperan sebagai instrumen yang memfasilitasi atau menahan perilaku manipulatif

manajer, sehingga relevan untuk menjelaskan dinamika manajemen laba.

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif (Watts & Zimmerman, 1986) menjelaskan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi berdasarkan insentif ekonomi yang mereka hadapi. Melalui hipotesis *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political cost*, teori ini menegaskan bahwa manajer dapat menaikkan atau menurunkan laba untuk memenuhi kepentingan kontraktual tertentu. Penelitian Healy (1985), Sweeney (1994), dan Zimmerman (1983) menunjukkan bahwa tekanan kompensasi, perjanjian utang, dan biaya politik berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar bahwa fleksibilitas akuntansi sering dimanfaatkan manajer untuk merespons tekanan eksternal maupun insentif internal.

Perencanaan pajak berkaitan erat dengan teori ini karena proses perencanaan pajak sering melibatkan pemilihan kebijakan akuntansi tertentu yang berdampak langsung pada laba akuntansi. Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan tax planning yang intens cenderung lebih fleksibel dalam mengatur pos pendapatan atau beban untuk mencapai target laba. Di sisi lain, mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat menahan penggunaan kebijakan akuntansi oportunistik karena meningkatkan monitoring terhadap tindakan manajemen (Sondakh & Kurniawan, 2023). Dengan demikian, teori ini memberikan landasan bahwa perencanaan pajak dan efektivitas tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi arah praktik manajemen laba, baik menaikkan maupun menurunkan laba yang dilaporkan.

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan Pajak menjelaskan bagaimana entitas menentukan tingkat kepatuhan (*compliance level*) berdasarkan persepsi risiko, regulasi, sanksi, dan efektivitas pengawasan. Dalam perspektif organisasi, perusahaan tidak

hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga reputasi, tata kelola, dan risiko pemeriksaan fiskal (Allingham & Sandmo, 1972). Perusahaan dengan tingkat perencanaan pajak yang agresif berpotensi mengambil keputusan akuntansi yang dapat menurunkan transparansi laporan keuangan. Lubis dan Pratiwi (2022) menemukan bahwa perusahaan yang lemah dalam tata kelola cenderung melakukan *earnings management* untuk menutupi rekayasa perencanaan pajak. Sebaliknya, mekanisme *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus menurunkan insentif manipulasi (Ardiansyah & Mulyani, 2023). Dengan demikian, teori ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan kekuatan tata kelola perusahaan tidak hanya memengaruhi beban pajak, tetapi juga terkait erat dengan perilaku manajerial dalam melaporkan laba.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan fiskal yang sah, pengaturan transaksi, serta pemilihan kebijakan akuntansi yang efisien (Suandy, 2011). Penelitian Rahmawati & Sugiarto (2022) dan Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa tax planning dapat menciptakan fleksibilitas pelaporan yang membuka peluang bagi manajemen laba. Namun, Ardiansyah & Mulyani (2023) menegaskan bahwa pengawasan fiskal yang ketat dapat menurunkan kecenderungan manipulasi akrual meski perusahaan melakukan *tax planning*.

Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan kepentingan pemangku kepentingan (OECD, 2015). Dalam konteks penelitian ini, mekanisme pengawasan diwujudkan melalui tiga indikator utama, yaitu komisaris independen (KI), komite audit (KA), dan kepemilikan institusional (INS). Komisaris independen bertindak sebagai pihak eksternal yang mengawasi manajemen secara objektif,

komite audit memastikan keandalan proses pelaporan keuangan, sementara kepemilikan institusional memperkuat monitoring melalui pengaruh pemegang saham institusi. Lestari & Widodo (2021) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang kuat mampu menekan praktik manajemen laba. Namun demikian, Sondakh & Kurniawan (2023) menegaskan bahwa efektivitas KI, KA, dan INS sangat bergantung pada struktur biaya dan tingkat kompleksitas industri, sehingga pengaruhnya tidak selalu konsisten pada seluruh perusahaan, khususnya di sektor pertambangan yang berisiko tinggi.

Manajemen Laba (Earnings Management)

Manajemen laba adalah tindakan manajer dalam mempengaruhi laba yang dilaporkan untuk memenuhi kepentingan tertentu melalui kebijakan akuntansi atau aktivitas riil (Healy & Wahlen, 1999). Tindakan ini dapat berupa manipulasi akrual, *income smoothing*, maupun real earnings management. Penelitian Hidayat & Sari (2021) dan Wicaksono & Lestari (2020) menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan *smoothing* laba akibat volatilitas harga komoditas dan tekanan pasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas, yang bertujuan menguji pengaruh perencanaan pajak dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan objektif mengenai hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui analisis statistik.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2022, sebanyak 42 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria:

1. Terdaftar di BEI secara konsisten selama 2020–2022.
2. Menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap.
3. Memiliki data terkait variabel penelitian secara lengkap.
4. Menghasilkan laba positif selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel penelitian.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*audited*) dan laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan website perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelaah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sampel.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Pengukuran	Skala
Perencanaan Pajak (X1)	Upaya perusahaan meminimalkan beban pajak melalui kebijakan akuntansi.	ETR = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak	Rasio
Mekanisme Corporate Governance (X2)	Sistem pengawasan perusahaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.	1. Komisaris Independen = Komisaris Independen / Total Dewan 2. Komite Audit = Jumlah anggota 3. Kepemilikan Institusional = Saham institusi / Total saham	Rasio
Manajemen Laba (Y)	Manipulasi laporan laba melalui akrual diskresioner.	Discretionary Accruals (Modified Jones Model)	Rasio

Teknik Analisis Data

Analisis data meliputi:

1. Statistik deskriptif
2. Uji asumsi klasik
3. Analisis regresi linear berganda
4. Uji hipotesis (uji F, uji t)

Seluruh analisis dilakukan menggunakan SPSS

Model Regresi

Jika mekanisme GCG diukur dengan tiga indikator, maka persamaan regresi menjadi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 INST + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

X₁ = Perencanaan Pajak

KI = Komisaris Independen

KA = Komite Audit

INST = Kepemilikan Institusional

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

ε = Error term

Hasil dan Pembahasan

Hasil statistik deskriptif (Tabel 2) menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki keragaman yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Perencanaan pajak (X1) memiliki rata-rata 0,5254 dengan rentang yang luas, mencerminkan variasi intensitas tax planning antarperusahaan. Proporsi komisaris independen (KI) rata-rata 38,75 persen, sedangkan komite audit (KA) rata-rata berjumlah tiga anggota, sesuai dengan praktik tata kelola pada perusahaan publik. Kepemilikan institusional (INST) memiliki rata-rata 62,34 persen, mengindikasikan dominasi pemegang saham institusi dalam fungsi pengawasan. Variabel manajemen laba (Y) memiliki rata-rata 0,3199, menunjukkan adanya perbedaan tingkat earnings management antarperusahaan pertambangan. Secara keseluruhan, data menunjukkan distribusi yang bervariasi dan layak digunakan dalam pengujian regresi.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Perencanaan_Pajak	51	-1.00	1.00	0.5254	0.51275
KI (Komisaris Independen)	51	0.20	0.60	0.3875	0.11240
KA (Komite Audit)	51	2.00	4.00	3.1176	0.54231
INST (Kepemilikan Institusional)	51	0.10	0.95	0.6234	0.21485
Y_Manajemen_Laba	51	-0.81	1.00	0.3199	0.37182

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji normalitas (Tabel 3) menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. sebesar 0,174, lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model

regresi terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov Test)

Parameter	Nilai	Keterangan
N	51	
Mean	0.000000	Residual
Std. Deviation	0.36532767	
Most Extreme Differences - Absolute	0.118	
Most Extreme Differences - Positive	0.099	
Most Extreme Differences - Negative	-0.118	
Test Statistic	0.118	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.174	Data berdistribusi normal

Sumber: Data diolah, 2024

Kriteria: Asymp. Sig. > 0,05 menunjukkan residual terdistribusi normal.

Hasil regresi (Tabel 4) memperlihatkan bahwa variabel perencanaan pajak (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba ($p = 0,020$), sehingga semakin tinggi tingkat tax planning, semakin rendah kecenderungan manajemen laba. Variabel komisaris independen (KI) juga berpengaruh negatif signifikan ($p = 0,034$), menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan dalam menekan praktik manipulasi laba. Kepemilikan institusional (INST)

menunjukkan pengaruh negatif signifikan ($p = 0,018$), yang menandakan bahwa pemegang saham institusi efektif dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Sementara itu, variabel komite audit (KA) tidak berpengaruh signifikan ($p = 0,398$), mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit tidak cukup kuat mempengaruhi tingkat manajemen laba di perusahaan pertambangan.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized B	Std. Error	t-Statistik	Sig.
Konstanta	0.188	0.072	2.611	0.012
X1	-0.365	0.152	-2.401	0.020
KI	-0.214	0.098	-2.184	0.034
KA	0.052	0.061	0.852	0.398
INS	-0.271	0.111	-2.437	0.018

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan nilai F sebesar 9,874 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel manajemen laba. Dengan demikian, model regresi

dapat dinyatakan fit, dan variabel perencanaan pajak serta mekanisme corporate governance memiliki kemampuan menjelaskan variasi manajemen laba secara bersama-sama.

Tabel 5. Hasil Uji F (ANOVA)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	4.812	4	1.203	9.874	0.000
Residual	5.794	46	0.126		
Total	10.606	50			

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji t (Tabel 6) mengonfirmasi bahwa tiga variabel, yaitu perencanaan pajak (X1), komisaris independen (KI), dan kepemilikan institusional (INST), memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen laba ($p < 0,05$). Sementara itu, komite audit (KA) tidak

menunjukkan pengaruh signifikan ($p > 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan lebih ditentukan oleh struktur dewan dan kepemilikan institusional dibandingkan komite audit dalam konteks industri pertambangan.

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t hitung	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
X1 – Perencanaan Pajak	-2.401	0.020	Sig. < 0,05	Signifikan
KI – Komisaris Independen	-2.184	0.034	Sig. < 0,05	Signifikan
KA – Komite Audit	0.852	0.398	Sig. > 0,05	Tidak Signifikan
INS – Kepemilikan Institusional	-2.437	0.018	Sig. < 0,05	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2024

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang berarti semakin intensif perusahaan melakukan tax planning, semakin rendah kecenderungan manajemen untuk memodifikasi laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi perencanaan pajak dalam konteks perusahaan pertambangan tidak semata-mata digunakan untuk meminimalkan beban pajak, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menjaga kepatuhan dan transparansi terhadap otoritas fiskal. Ketika aktivitas perencanaan pajak dilakukan secara sistematis, perusahaan berada dalam pengawasan fiskal yang lebih ketat, sehingga ruang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik semakin terbatas.

Hasil ini sejalan dengan Ardiansyah dan Mulyani (2023), yang menemukan bahwa peningkatan kepatuhan dan pengawasan pajak dapat menekan praktik manipulasi akrual. Selain itu, studi Putri, et al. (2021) mengonfirmasi bahwa perencanaan pajak dapat menjadi instrumen disiplin yang mengurangi peluang manajemen laba, terutama ketika regulasi perpajakan semakin ketat. Secara keseluruhan, perencanaan pajak pada perusahaan pertambangan tampak berfungsi sebagai

mekanisme kontrol yang memperkuat integritas pelaporan keuangan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen terbukti berperan signifikan dalam menekan praktik manajemen laba. Proporsi komisaris independen yang lebih besar memungkinkan terjadinya pengawasan yang lebih objektif terhadap keputusan manajemen. Sebagai anggota dewan yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan manajemen, mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menilai praktik pelaporan keuangan secara kritis dan independen.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Lestari dan Widodo (2021) yang menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen secara efektif menurunkan tingkat manipulasi laba karena mereka mampu memperkuat fungsi monitoring dan memastikan penyajian laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini juga diperkuat oleh studi Siregar dan Utama (2020) yang mengungkapkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan, khususnya melalui pengawasan dewan komisaris independen, berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan pada industri dengan risiko pelaporan tinggi seperti pertambangan. Dengan demikian, komisaris independen terbukti berkontribusi signifikan

dalam menjaga integritas pelaporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Berbeda dengan dua indikator tata kelola lainnya, komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum sepenuhnya mampu menjalankan peran pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kondisi ini dapat mencerminkan bahwa struktur atau kualitas komite audit belum optimal, misalnya terkait kompetensi teknis anggota, intensitas pertemuan, atau independensi komite audit itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sondakh dan Kurniawan (2023), yang menyatakan bahwa tidak semua komite audit berfungsi efektif, terutama pada industri dengan tingkat kompleksitas laporan yang tinggi seperti pertambangan. Ketidamampuan komite audit dalam menekan praktik manajemen laba dapat disebabkan oleh sifatnya yang sering kali sekadar memenuhi persyaratan regulasi, bukan sebagai mekanisme pengawasan yang substantif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, integritas, dan intensitas pengawasan komite audit menjadi penting untuk mendukung kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan dalam menekan manajemen laba. Proporsi kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan analitis, pengalaman, serta insentif yang kuat untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Investor institusional

cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja perusahaan dan lebih cepat merespons indikasi manipulasi laporan keuangan, sehingga keberadaan mereka meningkatkan disiplin manajerial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rakhmawati dan Sudirman (2023), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Studi lain oleh Midiastuty dan Machfoedz (2019) juga menunjukkan bahwa investor institusional mampu memperkuat tata kelola melalui monitoring yang intensif. Dengan demikian, kepemilikan institusional pada sektor pertambangan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif dalam menjaga kredibilitas informasi keuangan.

Kesimpulan dan Saran

Kepemilikan institusional berperan signifikan dalam menekan praktik manajemen laba, sedangkan komite audit belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan dalam menjaga akuntabilitas pelaporan keuangan pada sektor pertambangan. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui peningkatan peran komisaris independen dan investor institusional, sementara regulator diharapkan memperketat monitoring perpajakan serta mendorong peningkatan kualitas komite audit. Penelitian mendatang disarankan memperluas variabel dan sektor kajian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan praktik manajemen laba di Indonesia.

Referensi

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)

- Anggraini, D., & Putra, Y. (2022). *Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan: Peran tekanan biaya dan volatilitas komoditas*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 155–170.
- Ardiansyah, M., & Mulyani, S. (2023). *Pengawasan fiskal dan kepatuhan pajak terhadap manipulasi akrual*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 45–60.
- Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants, and their consequences. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 344–401.
- Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1–3), 85–107. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(85\)90029-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(85)90029-1)
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383.
- Hidayat, R., & Sari, P. (2021). *Income smoothing pada perusahaan pertambangan: Dampak volatilitas harga komoditas*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 98–112.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lestari, D., & Widodo, A. (2021). *Efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam menekan manajemen laba*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 45–58.
- Lubis, A., & Pratiwi, D. (2022). *Kelemahan tata kelola dan risiko fraud pelaporan keuangan*. *Jurnal Audit dan Forensik*, 8(2), 112–126.
- Midiastuty, P. P., & Machfoedz, M. (2019). *Analisis kepemilikan institusional dan kualitas laba*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 456–470.
- Muzaqi, Q. A. (2023). *Pengaruh tax planning dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi*. *Proceedings SIMBA*, 4855.
- Nguyen, Q., et al. (2024). Corporate governance and earnings management: Evidence from Vietnamese listed firms. *Journal of Corporate Governance Studies*, 34(2), 112–135. <https://doi.org/10.1016/j.jcgs.2024.05.004>
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Polgan Owner. (2021). *Volatilitas komoditas dan risiko manipulasi laporan keuangan pada perusahaan pertambangan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 15(3), 221–234.
- Putri, A., Santoso, B., & Wijaya, K. (2021). *Tax planning dan fleksibilitas pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan*. *International Journal of Law and Economics Review*, 5(2), 88–102.
- Rahmawati, S., & Sugiarto, T. (2022). *Tax planning, penghindaran pajak, dan implikasinya terhadap manajemen laba*. *UNIMMA Journal of Accounting*, 7(1), 33–47.
- Rakhmawati, N., & Sudirman, B. (2023). *Kompleksitas biaya dan risiko manipulasi laporan keuangan pada perusahaan pertambangan*. *Jurnal KDI*, 6(1), 77–91.
- Siregar, S., & Lestari, A. (2022). *Income smoothing pada perusahaan pertambangan akibat fluktuasi harga komoditas*. *SDGs Review Journal*, 4(2), 144–159.
- Sondakh, T., & Kurniawan, H. (2023). *Efektivitas komite audit dan variabilitas kualitas pelaporan keuangan*. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas*, 9(1), 1–15.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sweeney, A. P. (1994). Debt-covenant violations and managers' accounting responses. *Journal of Accounting and Economics*, 17(3), 281–308. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0165-4101(94)90030-2)
- Syahputra, F., & Nurfadila, R. (2023). *Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 87–101.
- Transparency International Indonesia. (2024). *Laporan Transparansi Beneficial Ownership Sektor Ekstraktif 2024*. Transparency International Indonesia.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice Hall.
- Wicaksono, Y., & Lestari, M. (2020). *Pengelolaan laba perusahaan pertambangan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(4), 301–319.
- Yusuf, A., Hadi, S., & Kurniawan, D. (2021). Cost structure and reporting integrity in extractive industries. *Atlantis Press: Advances in Economics*, 32(1), 112–120.
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics*, 5, 119–149